

## KOMODIFIKASI PEKERJA DI LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI BENGKULU

Oleh:

SINDY AMALIA PUTRI, ANIS ENDANG SM, FERA INDASARI

Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Dehasen Bengkulu

### ABSTRACT

*TVRI Bengkulu Public Broadcasting Institution (LPP) which is supposed to be responsible for the welfare of its workers, especially freelancers, is more concerned with the workload of its workers because a person's workload must be appropriate and balanced against the physical and psychological abilities of workers. This study aims to determine the commoditization of workers carried out on TVRI Bengkulu television station. This research method uses qualitative research methods which are presented descriptively. Informants in this study used purposive sampling, namely Kasubsidi TVRI Bengkulu Program, Journalists, News Administration, News Broadcasters, and employees who had worked at TVRI Bengkulu from various fields such as Journalists, Production Engineering, and Program Staff. Methods of collecting data using observation, in-depth interviews, and documentation. Data analysis techniques use the method of constant cooperative technique. Based on the results of the study, it can be seen that the occurrence of Commoditization of Workers in the TVRI Bengkulu Public Broadcasting Institution is true, this is indicated by the existence of work inequality ranging from additional work to the salary system obtained. When referring to the theory put forward by Vincent Mosco the media make optimal use of energy and mind by forcing them to do more than one job as a form of employee loyalty to the media industry.*

**Keywords:** *commoditization of workers, LPP TVRI Bengkulu, theory of political economy*

### PENDAHULUAN

Pengelolaan media massa dikategorikan sebagai sebuah industri. Pola manajemen industri secara langsung ataupun tidak langsung membentuk industri budaya media. Industri masuk dalam budaya ekonomi. Budaya ekonomi mempunyai prinsip dan hukumnya sendiri. Di satu sisi harus menjunjung moralitas, dalam hal ini memegang idealismenya, disisi lainnya untuk tetap eksis media dituntut oleh iklim industrialisasi budaya yang

mengedepankan persaingan ekonomi Garnham (*dalam McQuail, 2008: 82*).

Sebagai sebuah industri, perusahaan media sarat dengan kepentingan ekonomi dan politik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Dari sudut pandang ini, lembaga media dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik (Mosco, 1996:22-38). Dalam konteks ini, disebutkan Garnham (*dalam McQuail 2008:82*) kepentingan ekonomi politik

ditentukan oleh pemilik atau pembuat kebijakan media. Ekonomi politik memfokuskan pendekatan sebagai kelompok yang berhubungan pada struktur ekonomi politik, dinamika media, dan ideologi media.

Ekonomi politik media adalah sistem kapitalis media massa yang menginginkan keuntungan ekonomi dan politik. Untuk mencapai tujuan tersebut banyak industri media melakukan praktik-praktik komodifikasi dalam proses produksinya. Proses komodifikasi kaitannya dengan produk sedangkan proses produksi berhubungan dengan pekerja media. Media memanfaatkan tenaga dan pikiran secara optimal dengan cara memaksa mereka untuk melakukan pekerjaan lebih dari satu sebagai bentuk loyalitas pekerja terhadap industri media, namun upah yang didapatkan tidak sesuai dengan tenaga, pikiran yang dikeluarkan dalam proses produksi. Hal ini disebut dengan komodifikasi pekerja. (Mosco, 1996: 38)

Selain komodifikasi pekerja di atas, Mosco (2009:135-139) menyebutkan ada dua bentuk komodifikasi lainnya yang pertama, komodifikasi konten, dimana telah terjadi transformasi pesan dari hanya sekedar data menjadi sistem pemikiran penuh makna dalam bentuk produk yang dapat dipasarkan. Kedua, komodifikasi audiens, dimana audiens dijadikan komoditas yang "dijual" kepada para pengiklan. Audiens dijadikan komoditi para pelaku media untuk mendapatkan iklan dan pemasukan. Kasarnya media menjual rating atau *share* kepada pengiklan (Mosco, 1996:156).

Dalam komodifikasi pekerja, walaupun pekerja sering menyadari bahwa perusahaan media bertindak tidak adil, namun mereka menerima keadaan tersebut karena tuntutan kebutuhan hidup. Mereka membutuhkan

bayaran untuk kehidupan mereka. Hal ini menjadikan proses komodifikasi menjadi lebih rentan terjadi pada perusahaan dalam mementingkan aspek keuntungan ekonomi.

Mosco (*dalam* Mara Densa, 2014:4) menegaskan bahwa media dan posisi pekerja tidak akan pernah aman, apalagi nyaman. Para pekerja dipaksa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan demi meraup keuntungan. Hal ini menyebabkan para pekerja kesulitan dalam mendapatkan ruang bebas bagi idealisme/profesionalitas mereka. Kemampuan yang dimiliki pekerja seperti etos kerja atau loyalitas terhadap perusahaan media akan menjadi sia-sia dimata pemilik media apabila para atasan menggunakan atau tidak sukanya pada pekerja tertentu. Dalam permasalahan ini, pemilik media tidak memikirkan keadilan, kebijaksanaan, atau ketentuan hukum. Mereka menggunakan ketentuan hukum untuk kebutuhan menjeratkan kesalahan dan penetapan sanksi, sebaliknya mereka lebih sering bersikap masa bodoh saat menghadapi para pekerja yang berargumentasi atau memberikan saran supaya perusahaan lebih baik.

Di perusahaan-perusahaan media swasta, terutama yang telah memiliki beberapa platform media (konvergensi) komodifikasi pekerjamarak dilakukan karena dapat menekan biaya produksi. Banyak pengusaha media yang tidak lagi mempunyai idealisme. Artinya, mereka mendirikan perusahaan media bukan untuk mengembangkan jurnalisme, tapi untuk mengejar kepentingan ekonomi. Kapitalisasi industri media inilah yang berimbas pada pekerja media yang menjadi komoditas (komodifikasi) bagi industri media. Saat ini pekerja dituntut untuk bisa mengerjakan beberapa pekerjaan, bukan hanya job desk nya saja tetapi juga harus bisa melakukan beberapa

tugas sekaligus. Beban pekerja yang diberikan seharusnya diukur sesuai dengan kemampuan atau kapasitas diri seseorang, maupun waktu kerja yang dimiliki. Pada dasarnya sudah tidak ada lagi jam kerja baku untuk pekerja media. Dapat dilihat pada jam tayang tertentu terdapat kesalahan ejaan, penyebutan kalimat dan lain sebagainya, dikarenakan tekanan berat.

Berangkat dari hal ini, penulis berasumsi bahwa komodifikasi pekerja tidak hanya dilakukan oleh media swasta tetapi bisa saja terjadi di media milik pemerintah, salah satunya di TVRI. TVRI Bengkulu merupakan Lembaga Penyiaran Publik merupakan TV Nasional yang berdiri tahun 1962. TVRI Bengkulu merupakan stasiun televisi daerah yang didirikan oleh Televisi Republik Indonesia untuk wilayah Provinsi Bengkulu.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara awal penulis, diketahui terdapat beberapa permasalahan di TVRI, terutama dalam hal sistem kerja. Pekerja media TVRI yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara, karyawan LPP hingga *freelance* dalam produksinya mempunyai beban kerja yang berbeda-beda. Adanya perbedaan status tersebut masih rentan terjadinya ketidakadilan dalam proses produksi, mulai dari perbedaan gaji atau beban kerja.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menjadikan sejumlah data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Riche dalam Moleong (2006: 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-

lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, ada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode alamiah.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Penelitian di TVRI Bengkulu memiliki tujuan memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, juga sebagai control perekat sosial serta melestarikan budaya untuk kepentingan seluruh masyarakatnya. Namun dibalik tujuan tersebut *jobdesc* karyawan TVRI Bengkulu terutama *freelance* memiliki beban kerja. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Informan kunci bahwa jam kerja di media televisi tidak menentu kapanpun harus ada, yang mana setiap pagi sudah harus ada di kantor untuk absen dan sorenya kembali absen. Disaat ditugaskan atau dijadwalkan setiap karyawan harus mengerjakan pekerjaan tersebut. Beranjak dari hal ini ketika karyawan berprestasi dalam bekerja tidak mendapatkan kenaikan gaji atau penghargaan lainnya padahal setiap karyawan dituntut untuk menguasai keterampilan lain diluar *jobdesc*, besaran gaji dengan banyaknya pekerjaan yang dilakukan sangat berbeda terlebih lagi disaat lembur karyawan *freelance* tidak mendapatkan upah pimpinan hanya tau pekerjaan itu selesai tepat waktu. Dalam pekerjaan tersebut karyawan *freelance* tidak mendapat hari libur nasional maupun tanggal merah.

Dalam hal ini disebut ketimpangan pekerjaan, mulai dari pekerja *freelance* memiliki tambahan beban kerja, pembagian pekerjaan, lembur, penentuan hari libur, uang lembur, hingga sistem gaji TVRI. Ketimpangan ini masuk dalam kategori Komodifikasi Pekerja, dimana keahlian dan jam kerja

para pekerja dijadikan komoditas untuk dimanfaatkan. Komodifikasi yang sangat erat kaitannya dengan produk, namun proses produksi erat dengan fungsi atau guna pekerjaannya, dan telah menjadi komoditas yang telah dikomodifikasikan oleh pemilik modal. Pekerja dijadikan sebagai tugas kewajiban pekerja pada perusahaan.

Seperti yang sudah digambarkan, pekerja merupakan penggerak kegiatan produksi. Bukan hanya memenuhi kebutuhan perusahaan media saja, tapi pemanfaatan tenaga dan pikiran mereka secara optimal walaupun dengan upah yang tak seharusnya. Pekerja merupakan kesatuan konsep dari sebuah pekerjaan desain dan pelaksanaan, atau kekuatan untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Pemilik perusahaan atau pemberi kebijakan menggunakan keterampilan atau skill dari kemampuan pekerja untuk melaksanakannya. Komodifikasi tenaga kerja dilakukan dengan cara menggunakan sistem komunikasi dan teknologi untuk meningkatkan penguasaan terhadap tenaga kerja dan pada akhirnya mengkomodifikasi keseluruhan proses penggunaan tenaga kerja termasuk yang berada dalam industri komunikasi. Ekonomi-politik sebuah proses ketika para tenaga kerja sedang menjalankan kegiatan pekerjaannya, pada saat yang sama juga dikomodifikasi.

Biasanya beban kerja yang diterima seseorang harus sesuai dan seimbang terhadap kemampuan fisik maupun psikologis pekerja yang menerima beban kerja tersebut. Beban kerja sebagai suatu perbedaan antara kapasitas sistem yang memproses informasi yang dibutuhkan untuk mengerjakan tugas sesuai harapan dan kapasitas yang tersedia, ternyata *freelance* diberi tambahan beban kerja dari yang seharusnya dikerjakan. Jika beban kerja yang diberikan berlebih

maka akan menimbulkan kelelahan fisik atau mental, bahkan bisa mengakibatkan stres akibat tuntutan dan desakkan terkait dengan pekerjaan.

Dalam komodifikasi pekerja, dilihat dari hasil observasi tidak sesuai pada saat penelitian berlangsung. Hasil wawancara dengan informan kunci dan beberapa informan pokok mereka lebih bersikap netral, ada beberapa dari informan kunci yang berani menjelaskan secara terang-terangan bagaimana sistem kerja yang ada di TVRI. Pekerja di TVRI terutama *freelance* tidak mendapatkan jatah libur dikarenakan dianggap media televisi memang seharusnya tidak libur maupun itu tanggal merah atau hari libur nasional, padahal hari libur diatur dalam Undang-Undang no.13/2003 yang mana libur mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu, cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja bekerja selama 12 bulan terus menerus, dan pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi. Namun dalam kondisinya penulis menemukan bahwa pekerja tidak ada wewenang hari libur. Mereka dijadwalkan setiap hari nya untuk bekerja, untuk meliburkan diri mereka harus pintar memanfaatkan waktu.

Sistem gaji TVRI yang seharusnya diberlakukan bahwa setiap pekerja/buruh berhak memperoleh upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya. Berdasarkan satuan waktu bagi perusahaan dengan sistem waktu kerja 6 hari kerja/minggu. Tapi dari hasil penelitian, peneliti menemukan bahwa gaji yang pekerja terutama *freelance* belum sesuai standar. Mereka menerima gaji atau upah berdasarkan apa yang mereka kerjakan terkadang apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan apa yang didapatkan. Rata-rata pekerja TVRI sering melakukan protes terkait hal ini, namun apa yang diutarakan oleh pekerja

tidak pernah diterima lebih banyak diam, tidak memperhatikan hak dan kewajiban pekerja. Dari hasil penelitian dan hasil observasi mendapati hal yang berbeda hal ini dikarenakan bahwa karyawan yang bersikap netral telah terikat surat kerja dan cenderung memilih pekerjaan tersebut sebagai pilihan.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan Komodifikasi Pekerja di Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI Bengkulu disimpulkan bahwa sistem pekerja yang ada di TVRI Bengkulu telah terjadi Komodifikasi Pekerja meski hal tersebut tidak dilakukan secara terang-terangan. Dari hasil observasi bertolak belakang pada saat penelitian berlangsung yang lebih memihak kepada pemberi kebijakan.

Hal ini ditunjukkan adanya pemanfaatan tenaga kerja terutama *freelance*, hal ini dimulai dari beban kerja karyawan yang tidak seimbang dengan hasil yang mereka dapatkan, uang gaji yang tidak sesuai, tidak mendapatkan uang lembur jika pimpinan meminta lembur, tidak adanya hari libur yang ditentukan, dimana pekerja juga tidak mendapatkan kenaikan gaji atau penghargaan bila menghasilkan prestasi dalam bekerja, hingga aksi protes yang tidak pernah ditanggapi.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang diberikan antara lain:

1. Guna membuat profesionalitas karyawan hendaknya dalam bekerja, karyawan juga harus mendapatkan upah yang seharusnya didapatkan. Sehingga karyawan *freelance* lebih semangat dalam bekerja.

2. Hendaknya pekerjaan karyawan disesuaikan dalam surat kontrak yang telah tertera, agar pekerja bisa fokus mengerjakan pekerjaan mereka. Dan untuk meningkatkan kinerja karyawan, dengan memberikan penghargaan yang berupa tambahan gaji atau berbentuk tunjangan jabatan atau tunjangan yang lainnya terhadap karyawan yang berprestasi.
3. Tidak memaksakan atau menuntut karyawan terutama *freelance* mengerjakan pekerja lain selain *jobdesc* nyadan merespon protes karyawan guna memperbaiki mutu dan kualitas TVRI Bengkulu, Kepala stasiun LPP TVRI Bengkulu diharapkan mengambil peran penting ketika ada masalah yang menyangkut hak karyawan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- As'ad, Moh. 2002. *Psikologi Industri*. Yogyakarta, Liberty
- Badjuri, Adi. 2010. *Jurnalistik Televisi*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2012. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Halim, Syaiful. 2013. *Post Komodifikasi Media*. Yogyakarta, Jalasutra
- Karyanti, Rema. 2005. *Komunikasi Massa* Bandung, Simbiosis Rekatama Media
- Kusumaningrat, Hikmat dan Purnama, 2006. *Jurnalistik Teori dan Praktik*, Bandung, PT. Remaja Rosda Karya
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta, Kencana.
- McQuail, Dennis. 2012. *Teori Komunikasi Massa*, Penerjemah Agus Dharma. Jakarta, Erlangga